

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis pada BAB IV, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut ini:

1. Penyajian dan pengungkapan aset tetap peralatan dan mesin Pemerintah Provinsi papua pada tahun 2014 masih menggunakan SAP PP 24/2005 berbasis kas menuju akrual, sedangkan SAP PP 71/2010 Berbasis Akrual baru diimplementasikan pada tahun 2015 tetapi pada tahun anggaran 2018 dalam penerapan kebijakan akuntansi PP No 71 tahun 2010 masih belum optimal.
2. Pemda Provinsi Papua mengakui aset tetap peralatan dan mesin pada nilai perolehannya, baik aset tetap yang berasal dari pembelian maupun pengalihan antar SKPD.
3. Pemerintah Provinsi Papua telah mengidentifikasi penggunaan peralatan dan mesin khususnya kendaraan dinas operasional pemegang kendaraan sebagian besar telah dibuatkan surat pernyataan dari pemegang kendaraan yang menyatakan bahwa bersangkutan bersedia mengembalikan kendaraan yang dipegangnya apabila telah pindah, tidak menduduki jabatan dan/atau sebab lainnya.

5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Agar proses implementasi SAP PP 71/2010 berbasis akrual berjalan lancar, maka perlu dilakukan hal-hal berikut:
 - Melakukan pelatihan kepada petugas akuntansi secara berkala agar lebih memahami akuntansi dan laporan keuangan yang dibuatnya terutama terkait SAP PP 71/2010 berbasis akrual.
 - Melakukan pelatihan terhadap petugas barang secara berkala agar proses klasifikasi aset tetap lebih tepat.
 - Pemuktahiran aplikasi SIAP BMD

2. Bagi Masyarakat luas diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi mengenai aset tetap pemerintah daerah khususnya pada pemerintah daerah provinsi papua disajikan pada neraca dan diungkapkan Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Penyajian ini hanya terbatas pada analisis penyajian dan pengungkapan aset tetap peralatan dan mesin saja. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan evaluasi penyajian terhadap aset tetap yang lain secara kongrit agar lebih kompleks dan menyeluruh. Dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian lebih lanjut, terutama bagi peneliti yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan aset tetap pemerintah daerah yang lebih sempurna.